



BRÈM

**Berita Ekonomi Regional Madiun
Volume VI Tahun 2025**



PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buletin BREM Volume VI Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buletin ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* eksternal maupun internal akan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, antara lain berkaitan dengan kinerja APBN dan APBD pada wilayah kerja KPPN Madiun, opini pegawai, serta lensa peristiwa penting.



Buletin ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus edukasi bagi para pembaca. Selain itu, buletin ini kiranya mampu menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan keuangan kepada satuan kerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Kepala KPPN Madiun,



Ditandatangani secara elektronik

Joko Maryono

Berita Ekonomi Regional Madiun

PELINDUNG

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur

PENGARAH

Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono

PENANGGUNG JAWAB

Fijri Rahmawati

REDAKTUR

- Agustina Rahayuningtyas
- Hermawan Effendi

KONTRIBUTOR

- Agustina Rahayuningtyas
- Hermawan Effendi
- Anik Mariani
- Dias Iman Arta
- Yanuardi Bachtiar
- Ari Sulastris
- Affandi Pattangai



KPPN Madiun



kppn_madiun



KPPN Madiun



KPPN Madiun



@kppnmadiun



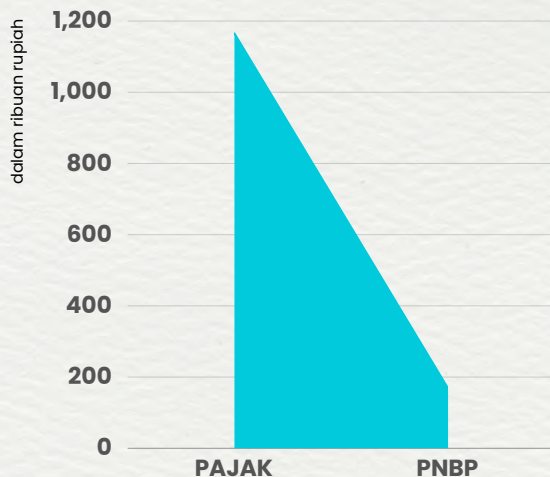
Jalan Salak Nomor 52, Taman Kota Madiun 63131

DAFTAR ISI

i	Pengantar	14	Pojok Inspirasi
iii	Daftar isi	15	Pojok Kreasi
1	Kinerja APBN Wilayah Kerja KPPN Madiun	16	Rangkuman Kegiatan KPPN Madiun Apri-Juni 2025
3	Opini	17	Pojok Madiun Raya
13	Ragam Madiun Raya		

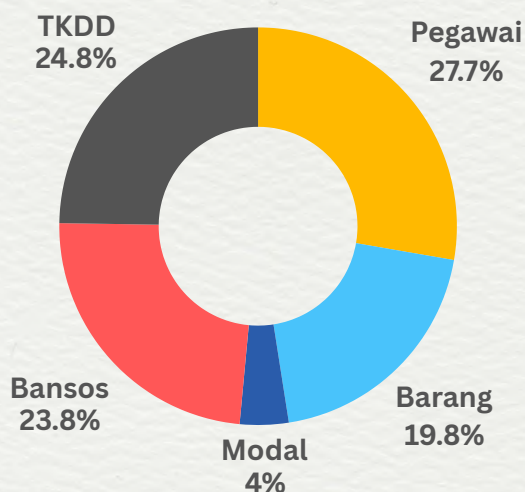
Kinerja APBN Wilayah Kerja KPPN Madiun Semester I 2025

A. Pendapatan Negara



Kinerja Pendapatan Negara pada 1 Januari hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp1,32 triliun atau sebesar 679% dari target Rp196,47 miliar. Pendapatan dari Perpajakan memiliki porsi pendapatan dengan capaian Rp1,16 triliun atau lebih rendah 20,8% dibandingkan periode sama tahun 2024 (YoY). Sementara, realisasi PNBP mencapai Rp168,82 miliar, meningkat sebesar 2,3% (YoY).

B. Belanja Negara

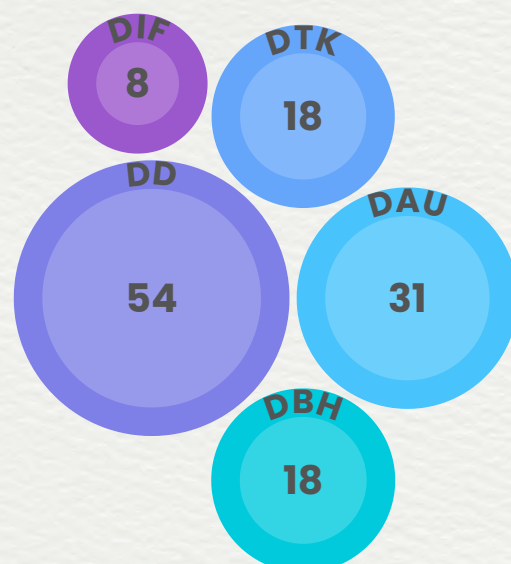


Kinerja Belanja Negara hingga 30 Juni 2025 telah mencapai Rp5,35 triliun (50%) dari pagu Rp10,66 triliun, lebih rendah 10,3% jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2024.

B.1 Kinerja Belanja K/L

Belanja pemerintah pusat dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Pegawai, yakni mencapai Rp1,18 triliun atau 56% dari pagu anggaran. Belanja Barang mencapai 40% atau Rp250 miliar, turun 48% dibanding nominal 2024. Kemudian, Belanja modal telah direalisasikan sebesar 8% atau sebesar Rp9,47 miliar, turun 85% dibanding nominal 2024. Sementara, Belanja Bantuan Sosial mencapai 48% atau sebesar Rp7,7 miliar, meningkat sebesar 23% dibanding nominal tahun lalu.

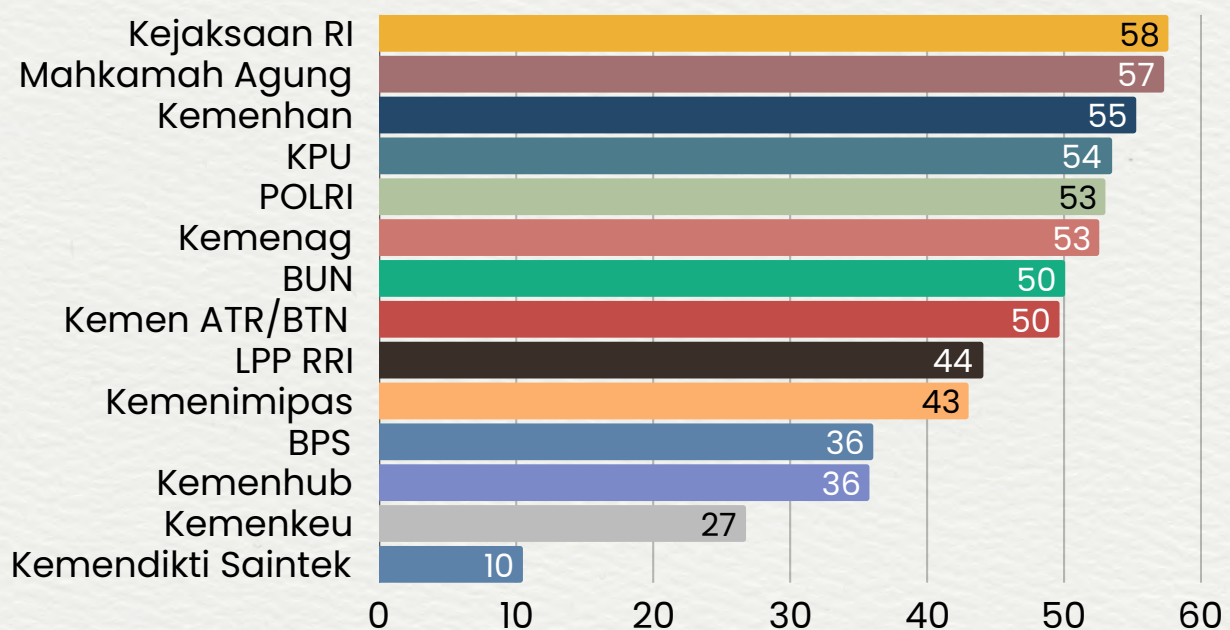
B.2 Kinerja Belanja TKD



Realisasi Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per 30 Juni 2025 lebih rendah 8,5% dibandingkan dengan periode sama tahun 2024. Secara nominal, penyaluran TKDD semester I 2025 mencapai Rp3,9 triliun.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp291,37 miliar atau sebesar 40% dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasikan sebesar Rp2,47 triliun atau sebesar 54% dari pagu. Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) direalisasikan sebesar Rp611,6 miliar atau 41% dari pagu. Dana Alokasi Khusus Fisik direalisasikan sebesar Rp5,34 miliar (2%), sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp606,3 miliar (50%). Selanjutnya, Dana Desa telah direalisasikan sebesar Rp478,2 miliar (55%) dan Dana Insentif Fiskal telah direalisasikan sebesar Rp48,7 miliar atau 50% dari pagu.

B.3 REALISASI PER K/L





OPINI

Menanti Implementasi Koperasi Desa

Merah Putih

Oleh: Anik Mariani*

Tata kelola dan rencana besar Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini tertuang dalam Asta Cita, dengan tujuan membangun pertumbuhan ekonomi dari tingkat paling bawah: desa dan kelurahan. Melalui koperasi ini, pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Koperasi Desa Merah Putih akan didirikan di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini tidak hanya menargetkan peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.

Diharapkan, koperasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan, menguatkan daya saing, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri. Desa Mandiri sendiri merupakan indikator keberhasilan pembangunan desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah menargetkan sebanyak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih terbentuk pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembentukan koperasi ini melibatkan 13 kementerian, 2 lembaga, serta para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia.

Tantangan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi ini dirancang untuk dibentuk melalui musyawarah desa, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dari berbagai kelompok sosial dan ekonomi. Namun, tidak sedikit desa yang masih menyimpan berbagai pertanyaan mendasar, antara lain siapa yang membiayai pembentukannya, dari mana sumber awal modal koperasi berasal, juga bagaimana menentukan jenis usaha yang tepat sesuai karakteristik desa.

Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi penggerak koperasi agar benar-benar bisa berjalan dan berkembang.

Solusi atas Tantangan Pembentukan

Pemerintah telah mengatur bahwa dana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berasal dari APBN, APBD, serta Dana Desa. Penggunaan Dana Desa untuk pembentukan koperasi dibatasi maksimal 3% dari total Dana Desa yang diterima, yang dapat digunakan untuk

- pembiayaan koordinasi dan rapat pembentukan koperasi, dan
- pengurusan akta pendirian koperasi (maksimum Rp2.500.000).

Langkah percepatan pembentukan koperasi juga diperkuat melalui kebijakan Menteri Keuangan, sebagaimana tertuang dalam surat nomor 9/MK/PK/2025 tanggal 14 Mei 2025. Surat tersebut menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa tahap II mensyaratkan

1. Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi, dan
2. Akta pendirian koperasi atau bukti penyampaian dokumen pendirian ke notaris.

Kebijakan ini menjadi insentif bagi kepala desa dan tokoh masyarakat agar segera terlibat dalam proses pendirian koperasi, mengingat Dana Desa tahap II sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional kegiatan desa. Namun demikian, dukungan pembiayaan semata belum cukup. Yang lebih krusial adalah pendampingan berkelanjutan dalam operasional koperasi, termasuk untuk penguatan tata kelola organisasi dan keuangan, pendampingan pemilihan usaha yang relevan dengan potensi lokal, serta pelatihan SDM pengelola koperasi.

Tantangan ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga yang diberi mandat untuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. **Dengan koordinasi yang solid, diharapkan koperasi ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.**

*Penulis adalah Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Madiun. Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan institusi.



OPINI

Program Makan Bergizi: Perjalanan Gizi untuk Anak Negeri

Oleh: Affandi Pattangai *)

Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah langkah terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan serius bangsa dalam mengatasi gizi buruk dan tengkes. Lebih dari sekadar bantuan sosial, MBG adalah manifestasi nyata dari kehadiran negara, memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi dan kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi.

Menurut data yang dihimpun dari Korem 081/DSJ per tanggal 17 Juni 2025, sebanyak 15.384 paket makanan telah disalurkan kepada lebih dari 25.000 pelajar di 125 sekolah di wilayah Madiun Raya. Cakupan yang luas ini membuktikan bahwa MBG bukan sekadar proyek seremonial, melainkan program terstruktur, terukur, dan berbasis kolaborasi antara TNI, yayasan sosial, dan masyarakat, dengan dukungan penuh pembiayaan negara melalui APBN.

Menjawab Tantangan Gizi dan Pendidikan

MBG hadir untuk menjawab dua tantangan mendasar pendidikan di Indonesia: akses gizi dan kesiapan belajar. Rendahnya daya serap pelajaran di banyak sekolah sering kali tidak disebabkan oleh kualitas guru semata, melainkan karena peserta didik datang ke sekolah dalam kondisi belum makan atau kekurangan asupan bergizi. Dalam konteks ini, MBG menjembatani ketimpangan dengan cara yang sederhana tetapi sangat bermakna: menyediakan makan bergizi setiap hari.

Model Desentralisasi yang Memberdayakan

Hal yang patut diapresiasi adalah model pelaksanaannya yang desentralistik. Dapur SPPG dan SPPG *Hybrid* tersebar di berbagai titik wilayah Ponorogo, Madiun, Magetan, dan Ngawi. Selain memudahkan logistik, model ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Banyak dapur dijalankan oleh yayasan masyarakat setempat dan bermitra dengan UMKM katering seperti Catring Rososiro di Magetan, menciptakan efek ganda bagi kesejahteraan warga sekitar.

Pengelolaan keuangan negara yang profesional adalah kunci sukses Program MBG

Penyaluran dana yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Ini adalah bukti bahwa pengelolaan keuangan negara yang profesional mampu menghadirkan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Perlu Evaluasi dan Penguatan Berkelanjutan

Meski menunjukkan capaian positif, Program MBG tetap membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan, khususnya dalam hal efektivitas distribusi, pemenuhan standar gizi, serta pengukuran dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan prestasi siswa. Idealnya, program ini juga dibarengi dengan indikator evaluatif seperti tingkat kehadiran siswa, status gizi (BB/TB), dan perkembangan nilai akademik sebagai tolok ukur keberhasilannya.

Penutup

Dengan segala capaian dan tantangannya, program MBG di wilayah Madiun Raya menjadi contoh nyata bagaimana anggaran negara dapat hadir langsung dalam kehidupan rakyat—secara konkret dan bermakna. Dalam setiap kotak makan yang dibagikan setiap pagi, sejatinya sedang diletakkan pondasi peradaban bangsa. Dimulai dari satu hal mendasar: memastikan anak-anak Indonesia belajar dengan kondisi gizi yang cukup dan seimbang.

**Penulis adalah Pelaksana pada KPPN Madiun. Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan institusi.*



OPINI

Refleksi Delapan Bulan Platform Pembayaran Pemerintah

Oleh: Agustina Rahayuningtyas *)

Delapan bulan sudah, pembayaran transaksi belanja operasional (*common expenses*) melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) diterapkan pada seluruh satuan kerja kementerian/lembaga (di luar Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI). Dalam kurun waktu tersebut, pembayaran dari APBN di wilayah kerja KPPN Madiun ke pihak mitra PPP, yakni PLN dan Telkom, telah mencapai Rp9,55 miliar.

Sebagaimana dituangkan dalam buku Manual Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah Tahun 2024 Edisi *Common Expense* yang diterbitkan Ditjen Perbendaharaan, Platform Pembayaran Pemerintah dibangun dengan beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut mencakup proses input data yang dilakukan secara *single entry*, dokumen transaksi pembayaran yang berbentuk digital, adanya penerapan tanda tangan elektronik dan *one time password* untuk keamanan transaksi, serta jadwal pembayaran yang pasti karena adanya *payment schedule* (DJPb, 2024).

Pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 lalu, adanya Platform Pembayaran Pemerintah juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun proyeksi kebutuhan anggaran. Menurut Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan saat itu, adanya proyeksi tersebut kemudian akan meningkatkan akurasi dalam proses penganggaran belanja operasional (Antaranews, 2021).

Perkembangan PPP di Wilayah Kerja KPPN Madiun

Selama Oktober 2024 hingga Juni 2025, nilai tagihan pembayaran listrik, telepon, atau internet yang diterbitkan PLN dan Telkom dalam PPP mencapai Rp10,14 miliar. Setiap bulannya, rata-rata nilai tagihan mencapai Rp1,12 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp9,55 miliar (94,1 persen) tagihan diajukan satker ke KPPN dan diproses SP2D. Sementara, Rp596 juta tagihan (5,9 persen) tidak dibayarkan dengan SPM PPP dan dibayar melalui kanal lain.

Data juga menunjukkan bahwa tagihan PPP tertinggi terjadi pada bulan November 2024, yaitu senilai Rp1,4 miliar, dan yang terendah adalah pada bulan April 2025 senilai Rp956 juta. Sementara, pembayaran melalui kanal lain yang tertinggi terjadi pada bulan Desember 2024, yakni senilai Rp210 juta, dan yang terendah adalah pada bulan Maret 2025 senilai Rp2,1 juta.

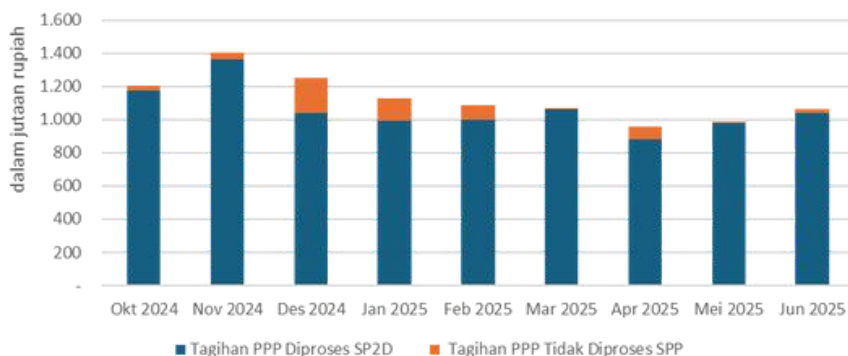
Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi belanja akun Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon dengan sumber dana Rupiah Murni dan PNPB pada seluruh satker, diketahui bahwa rata-rata sekitar 80 persen realisasi Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon berasal dari pembayaran PPP tiap bulannya. Porsi pembayaran tertinggi melalui PPP terjadi pada bulan November 2024, yaitu mencapai 94 persen, sedangkan porsi terendah pada bulan Juni 2025, yakni hanya 59 persen. Kondisi pada bulan Juni 2025 tersebut dipengaruhi adanya lonjakan realisasi Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon dari satker lingkup Kepolisian RI.

Selama tahun 2022 hingga 2025, pagu tertinggi untuk Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon (dengan sumber dana Rupiah Murni dan PNPB) terjadi di tahun 2024, yaitu mencapai Rp18,58 miliar. Pada tahun 2025, nilai pagu turun menjadi Rp18,14 miliar dan masih ada blokir dana senilai Rp226 juta sehingga pagu efektif tersisa Rp17,9 miliar. Blokir untuk kedua akun tersebut tidak pernah terjadi di tahun 2022-2024.

Kemudian, selama tahun 2022 hingga 2024, rata-rata realisasi Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon mencapai Rp17,5 miliar. Jika kebutuhan untuk tahun 2025 diestimasi sebesar Rp17,5 miliar tersebut, pagu efektif sebesar Rp17,9 miliar masih mencukupi.

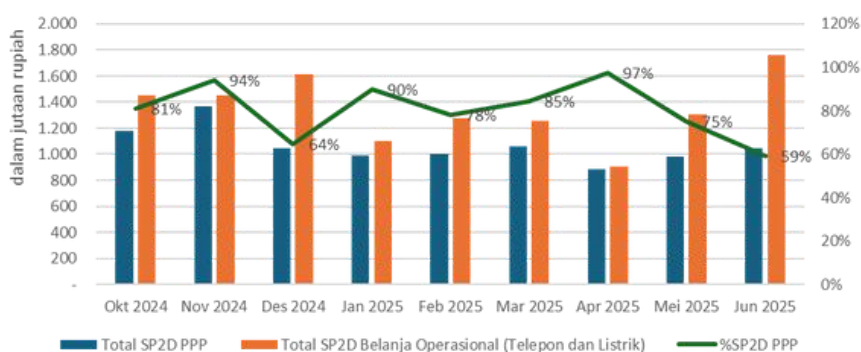
Perkembangan Tagihan PPP Oktober 2024 hingga Juni 2025

Sumber: Monsakti, diunduh 6 Juli 2025 pukul 21.32 WIB (diolah)



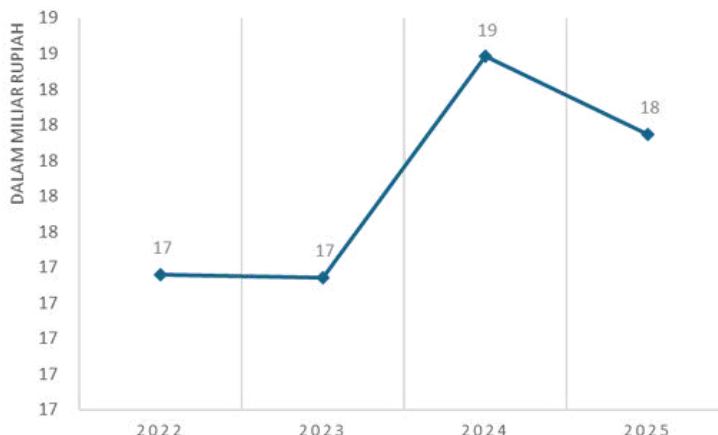
Perkembangan Realisasi Belanja Operasional Oktober 2024 hingga Juni 2025

Sumber: Sintesa, diunduh tanggal 6 Juli 2025 pukul 19.53 WIB (diolah)



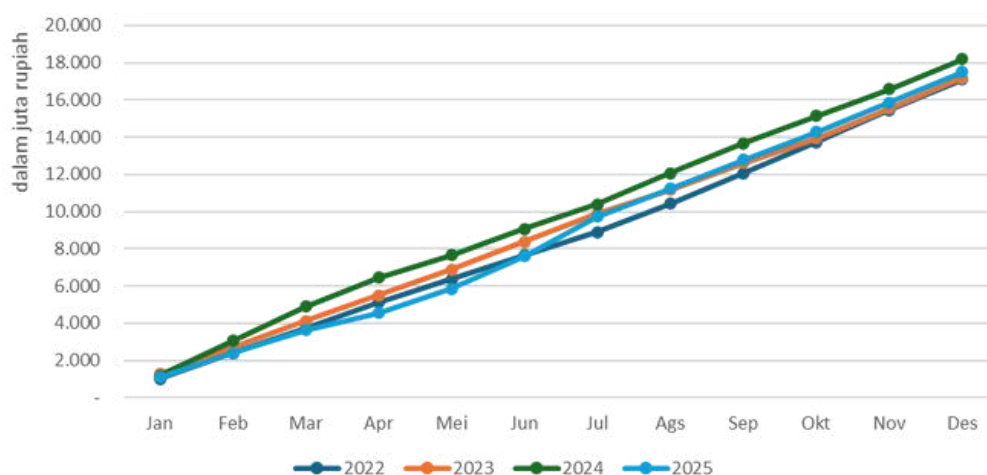
Perkembangan Pagu Belanja Operasional 2022-2025

Sumber: Sintesa, diunduh tanggal 6 Juli 2025 pukul 19.53 WIB (diolah)



Tren nilai tagihan belanja operasional PPP selama Oktober 2024 hingga Juni 2025 menunjukkan bahwa rata-rata tagihan per bulan mencapai Rp1,12 miliar. Dengan angka tersebut, tagihan PPP selama setahun diestimasikan sebesar Rp13,53 miliar. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan nilai SP2D Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon (dengan sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN) dalam kurun waktu yang sama, rata-rata nilai tagihan PPP adalah 86 persen dari SP2D di bulan tersebut. Dengan demikian, proyeksi kebutuhan Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon (dengan sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN) selama setahun adalah Rp16,91 miliar. Proyeksi dengan data ini juga masih di bawah pagu efektif tahun 2025 sebesar Rp17,9 miliar.

Tren Realisasi Belanja Operasional 2022-2024 dan Proyeksi 2025
Sumber: Sintesa, diunduh tanggal 6 Juli 2025 pukul 19.53 WIB (diolah, Juli-Desember 2025 menggunakan proyeksi)



Isu dan Tantangan

Dalam delapan bulan perjalanan PPP di KPPN Madiun, terdapat beberapa isu yang perlu diantisipasi, antara lain yaitu adanya dobel pembayaran antara PPP dan kanal lain, kendala pembayaran di awal tahun pada satker-satker yang terdampak pemecahan kementerian/lembaga di kabinet baru, dan pembayaran tagihan yang tidak dapat dilakukan melalui PPP karena kondisi tertentu, seperti ketiadaan pejabat perbendaharaan aktif.

Mengenai dobel bayar PPP dan kanal lain, data dari Direktorat Sistem Perbendaharaan menunjukkan bahwa selama Oktober 2024 hingga April 2025 terdapat 15 satker yang pernah mengalami dobel pembayaran. Sebanyak 4 satker pernah dobel bayar tagihan PLN, sedangkan 14 satker pernah dobel bayar tagihan Telkom. Kemudian, jika dilihat dari frekuensi dobel bayar, sebanyak 10 satker dobel bayar 1 bulan, 3 satker dobel bayar sebanyak 3 bulan, dan masing-masing 1 satker dobel bayar sebanyak 2 dan 4 bulan.

Penyebab dobel bayar sendiri umumnya karena kurangnya koordinasi di internal satker sehingga satu pihak membayar tagihan melalui PPP, sedangkan satu pihak lainnya membayar melalui kanal lain. Ada pula satker yang tidak menyadari bahwa *autodebet* pembayaran belum dinonaktifkan. Atas kondisi ini, meskipun saat ini telah diberlakukan bahwa pembayaran di kanal lain hanya bisa dilakukan setelah tanggal 20, perlu ditekankan kepada satker agar memastikan bahwa pembayaran tagihan hanya dilakukan sekali dan diprioritaskan melalui PPP.

Berkenaan dengan pemecahan kementerian/lembaga di kabinet baru, dari 9 satker yang terdampak, terdapat 3 satker yang tidak dapat membayar tagihan PLN dan Telkom bulan Januari 2025 melalui PPP. Kendala yang dihadapi yakni belum siapnya pejabat perbendaharaan ketika periode penyampaian SPM dan tidak munculnya data tagihan di kode satker baru karena satker terlewat melakukan hapus dan rekam data nomor pelanggan di SAKTI. Karena kondisi tersebut, satker kemudian membayar lewat kanal lain.

Selain itu, terdapat pula kondisi-kondisi yang menyebabkan pembayaran tagihan tidak dilakukan melalui PPP. Dalam delapan bulan ini, kondisi tersebut meliputi pagu dana tidak mencukupi sehingga satker harus melakukan revisi anggaran terlebih dahulu, pagu akun masih dalam proses revisi anggaran, pejabat perbendaharaan sedang cuti ketika periode penyampaian SPM ke KPPN, pejabat perbendaharaan ada pergantian dan belum selesai proses pendaftaran di SAKTI, serta satker lupa mengajukan SPM sesuai batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jadwal-jadwal penting mengenai PPP perlu didiseminasikan dengan lebih marak agar satker siap memproses tagihan sesuai waktunya.

Terakhir, meskipun di uraian sebelumnya nilai pagu anggaran Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon secara total diprediksi cukup hingga akhir tahun 2025, tetap perlu diantisipasi adanya kondisi anggaran yang tidak cukup di tingkat satker. Dengan memanfaatkan tren realisasi selama semester I 2025, apabila pagu anggaran tetap sama seperti saat ini, diprediksi sekitar 16 satker akan mengalami pagu minus pada akun Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon di akhir tahun karena pagu yang tersedia lebih rendah dibanding nilai tagihan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian baik bagi satker maupun kementerian/lembaga sehingga kecukupan penganggaran dapat disiapkan sejak dini.

Harapan ke Depan

Keberadaan PPP telah menghadirkan beberapa kepastian yang sebelumnya tidak ada, antara lain kepastian waktu pengajuan tagihan dan pembayaran. Bagi KPPN, kepastian tersebut memudahkan pemantauan perencanaan kas tiap bulan. Bagi satuan kerja, kepastian tersebut memudahkan pengaturan pelaksanaan anggaran. Di samping itu, PPP juga menjadi alat tambahan dalam menyusun estimasi kebutuhan anggaran yang akurat.

Berkaca dari perjalanan delapan bulan ini, prioritas pembayaran melalui PPP perlu terus digalakkan. Satker juga perlu terus diedukasi sehingga terbentuk pola pikir dan perilaku dalam membayar tagihan belanja operasional sesuai batas waktu. **Dengan data tagihan dan pembayaran PPP yang makin akurat, penganggaran untuk tahun berikutnya juga diharapkan dapat semakin dekat dengan kebutuhan yang sebenarnya.**

**Penulis adalah Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Madiun. Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan institusi.*

Referensi:

Antaranews. (2021, November 6). Kemenkeu luncurkan Platform Pembayaran Pemerintah. <https://www.antaranews.com/berita/2506165/kemenkeu-luncurkan-platform-pembayaran-pemerintah>

DJPb. (2024). Manual Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah Tahun 2024 Edisi Transaksi Common Expense. <https://drive.google.com/file/d/12rWHu6k7RgRhFVb8pt9RuY6Wu0KfU3kb/view>



OPINI

PKIPA: Benteng Integritas Anggaran yang Tak Bisa Sekadar Dicentang

oleh: Erwin P. Wijaya *)

Di negeri yang setiap rupiahnya berasal dari keringat rakyat, integritas merupakan napas utama. Tanpa integritas, laporan keuangan hanyalah parade angka kinclong yang menipu, menampilkan kecantikan administratif sambil menyembunyikan rapuhnya tanggung jawab moral.

Pejabat perbendaharaan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, hingga bendahara memikul amanah besar. Mereka wajib memastikan uang negara dikelola seterang matahari dan setegas hukum. Di sinilah Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) berperan sebagai palang pintu pertama yang menghalau praktik "asal tanda tangan".

Sejak diintegrasikan ke dalam aplikasi SAKTI, PKIPA bukan sekadar dokumen elektronik yang menunggu tanda tangan. Ia menjadi manifesto moral. Di deklarasi tertulis bahwa setiap transaksi di balik layar sistem telah melalui uji nyali etika.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 menempatkan PKIPA sebagai komponen vital internal kontrol pemerintah. Tak ada PKIPA, transaksi otomatis terkunci. Ini merupakan pesan keras bahwa integritas bukan pilihan, melainkan syarat hidup-mati alur anggaran. Secara regulasi, PKIPA mempunyai empat lapisan pengaman yang saling menguatkan:

1. PKIPA Awal: ditandatangani di awal tahun, ibarat sumpah jabatan baru sebelum bersentuhan dengan uang rakyat.
2. PKIPA Periodik: dilaksanakan dua kali setahun sebagai pengingat bahwa komitmen bukan janji sesaat, melainkan napas panjang yang harus dicek rutin.
3. PKIPA Perubahan: diwajibkan saat ada mutasi pejabat guna memastikan estafet tanggung jawab tak jatuh ke tangan hampa.
4. PKIPA Transaksi: diwajibkan di setiap transaksi di SAKTI yang berarti setiap klik disertai cap "saya bertanggung jawab".

Sebagai informasi, tiga jenis pertama mengharuskan tanda tangan elektronik seluruh pejabat perbendaharaan. Cukup satu yang mangkir, sistem menolak bergerak. Di era tanda tangan digital tersertifikasi, **"lupa menandatangani"** bukan lagi alasan.

Bagaimana Praktik Baik di Lapangan?

Ambil contoh KPPN Madiun. Dengan tenggat 22 Mei 2025, seluruh satuan kerja di wilayah ini menuntaskan PKIPA tahap I sampai dengan V tanpa sisa. Admin satuan kerja rajin memperbarui data pejabat. PPSPM, bendahara, serta PPK sigap mengeklik TTE, lalu KPA mengesahkan. KPPN pun memonitor setiap saat. Hasilnya? Transparansi bukan jargon musiman, melainkan kultur kerja terukur.

Mengapa PKIPA Penting?

PKIPA menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar *compliance system*, tetapi kesediaan personal untuk menanggung akibat. Dokumen ini menyatukan sanksi hukum dan beban moral sehingga memaksa setiap pejabat menyadari, **“ANGGARAN NEGARA ADALAH AMANAH, BUKAN ATM PRIBADI”**. Ketika integritas dibakukan di hulu, potensi penyimpangan di hilir kian sempit.

PKIPA sering dicap tambahan pekerjaan. Padahal, ia laksana sabuk pengaman. Sedikit merepotkan, tetapi menjadi penyelamat dari kecelakaan fatal. Apabila seluruh pejabat perbendaharaan memaknainya sebagai wujud pertanggungjawaban profesional disertai hati nurani, PKIPA akan berdiri sebagai benteng kokoh pengelolaan anggaran yang bersih, efektif, dan terpercaya. PKIPA bukan hanya lembar yang menunggu dicentang, ia adalah pernyataan tegas bahwa uang rakyat dikelola oleh tangan-tangan yang sadar akan dosa birokrasi dan pahala integritas. Jika komitmen ini dihidupi, Indonesia tak hanya punya laporan keuangan rapi, tapi juga hati birokrasi yang jujur.

*Penulis adalah Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Madiun. Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan institusi.

Ragam Madiun Raya

Inflasi Kota Madiun pada Juni 2025 Sebesar 1,90 Persen

Pada Juni 2025, inflasi *year on year* (y-on-y) Kota Madiun sebesar 1,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,28. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,35 persen; kelompok transportasi sebesar 0,76 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,31 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,67 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,10 persen. Sementara, terdapat satu kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,38 persen. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Kota Madiun bulan Juni 2025 masing-masing sebesar 0,33 persen dan 1,21 persen.

Sumber: BPS Kota Madiun, <https://madiunkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/04/08/222/pada-maret-2025--inflasi-year-on-year--y-on-y--kota-madiun-sebesar-0-20-persendengan-indeks-harga-konsumen--ihk--sebesar-106-33-.html>

PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN KOTA MADIUN, JUNI 2025

Berita Resmi Statistik No. 15/07/3577/Th. XV, 1 Juli 2025



Month-to-Month (M-to-M)

INFLASI 0,33 %

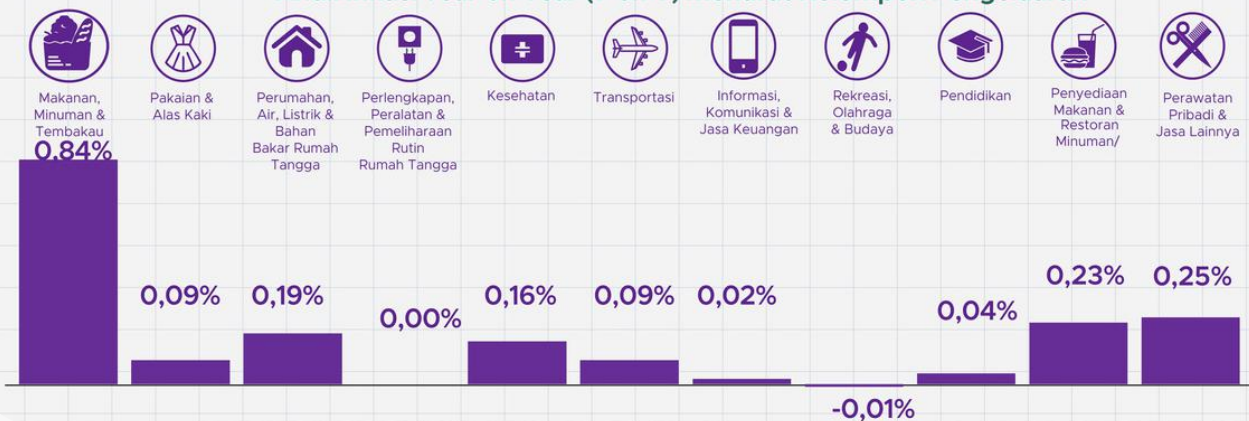
Year-to-Date (Y-to-D)

INFLASI 1,21 %

Year-on-Year (Y-on-Y)

INFLASI 1,90 %

Andil Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) menurut Kelompok Pengeluaran



Pojok Inspirasi

Setiap hari jalanan kota menjadi saksi ribuan perjalanan. Sepeda motor, mobil, dan kendaraan umum melaju bersama, masing-masing menuju tujuan mereka. Kita tentunya juga termasuk dalam peramai suasana di jalanan tersebut. Di tengah keramaian itulah, kita bisa menemukan cerminan nyata dari bagaimana sebuah organisasi berjalan dan bagaimana kepemimpinan memegang peran yang sangat krusial.

Marilah kita bayangkan sekelompok pengendara yang berjalan beriringan. Di depan, ada satu kendaraan yang menjadi penunjuk arah, bisa jadi orang tersebut adalah pemimpin komunitas *touring* atau sekedar pengendara yang berada di barisan pertama. Tugasnya bukan hanya menuntun ke tujuan, tetapi juga memberi sinyal yang jelas, kapan harus berbelok, kapan harus melambat, dan kapan harus berhenti karena dia lebih tahu secara jelas kondisi lalu lintas yang ada di depan.

Sebagai contoh, di perempatan jalan secara tiba-tiba lampu lalu lintas berubah merah. Sang pemimpin berhenti tepat waktu, mengangkat tangannya sebagai tanda agar yang lain waspada. Seluruh barisan di belakang pun ikut berhenti. Kondisi tersebut bisa dikatakan aman dan tertib, tidak ada yang terserempet dan tidak ada yang tertinggal. Namun, bayangkan jika sang pemimpin tidak memberi tanda, tidak peduli, atau bahkan menerobos lampu merah. Apa yang terjadi? Kebingungan, tabrakan, bahkan bisa-bisa terjadi hal fatal yang bisa memakan korban.

Begitu pula dalam Organisasi!!!



Seorang pemimpin ibarat pengendara di barisan paling depan. Ia melihat rintangan lebih dulu, membaca situasi jalan, dan memutuskan kapan harus melaju atau berhenti. Tanpa kepemimpinan yang bijak dan tegas, organisasi bisa kehilangan arah. Keputusan yang kabur, seperti lampu sen yang tidak dinyalakan, berakibat membingungkan, berisiko, dan menyisakan celaka.

Dalam dunia kerja, sekolah, komunitas, bahkan dalam sebuah keluarga, kepemimpinan yang baik adalah yang mampu mengarahkan tanpa mencelakakan. Ia tahu kapan harus memberi instruksi, kapan mendengarkan, dan kapan menunggu hingga semua siap kembali melaju. Kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Namun, siapa yang mampu membawa seluruh timnya selamat sampai tujuan.

Maka, sebagaimana kita menghormati rambu dan lampu merah di jalan, marilah kita juga belajar menghargai dan menumbuhkan kepemimpinan yang jelas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dalam setiap perjalanan, baik di jalanan maupun dalam organisasi, **keselamatan dan keberhasilan tidak hanya bergantung pada kecepatan, tapi pada arahan yang benar dari mereka yang ada di depan.**

Pojok Kreasi

WASPADA QUISHING

Quishing adalah jenis serangan *phishing* yang menggunakan kode QR untuk menipu orang agar mengunjungi situs web berbahaya atau mengunduh file yang berisi *malware*.



CREATED BY: KIDNEP

Rangkuman Kegiatan KPPN Madiun Bulan April-Juni 2025



- KPPN Madiun menyelenggarakan Kegiatan Audiensi Strategis dengan Wali Kota Madiun
- KPPN Madiun menyelenggarakan Kegiatan Audiensi Strategis dengan Bupati Ponorogo
- KPPN Madiun menyelenggarakan Kegiatan Audiensi Strategis dengan Bupati Ngawi
- Sosialisasi Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA)

Melalui kegiatan ini, KPPN Madiun berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik dan mempertahankan prestasi di tahun-tahun mendatang.

Pojok Madiun Raya

Grebeg Suro Ponorogo: Merayakan Jejak Sejarah, Seni, dan Spiritual di Bumi Reog

Setiap tahun, saat Tahun Baru Islam menjelang, Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur bergemuruh. Bukan oleh gempa, melainkan oleh perayaan akbar yang telah menjadi ikon: Grebeg Suro. Lebih dari sekadar pesta rakyat, Grebeg Suro adalah manifestasi kaya akan sejarah, seni, dan spiritualitas yang mengakar kuat dalam identitas Bumi Reog.

Jejak Sejarah: Dari Ritual Kesuburan hingga Perayaan Modern

Asal-usul Grebeg Suro dapat ditelusuri jauh ke masa lalu, berakar pada ritual-ritual agraris kuno sebagai wujud syukur atas kesuburan tanah dan hasil panen. Seiring waktu, tradisi ini berakulturasi dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha dan kemudian Islam, membentuk Grebeg Suro yang kita kenal sekarang. Kata "Grebeg" sendiri merujuk pada keramaian atau arak-arakan, sementara "Suro" adalah bulan Muharram dalam kalender Jawa.

Pada era modern, Grebeg Suro telah berevolusi menjadi festival budaya berskala besar yang didukung penuh oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, esensi dan nilai-nilai tradisionalnya tetap lestari. Perayaan ini bukan hanya ajang hiburan, melainkan juga upaya pelestarian warisan budaya yang tak ternilai.

Pesona Seni: Reog Ponorogo sebagai Mahkota Acara

Tidak dapat dimungkiri, magnet utama Grebeg Suro adalah penampilan kolosal Reog Ponorogo. Kesenian adiluhung ini menjadi jantung dari seluruh rangkaian acara. Barisan penari Dadak Merak dengan mahkota raksasa berhias bulu merak, Warok dengan aura mistisnya, Jathil yang lincah, dan Bujang Ganong yang jenaka, semuanya bersatu padu menciptakan pertunjukan yang memukau.

Selama Grebeg Suro, berbagai grup Reog dari seluruh pelosok Ponorogo, bahkan dari luar kota, turut unjuk kebolehan dalam Festival Nasional Reog Ponorogo. Persaingan sengit dan pertunjukan spektakuler ini menjadi daya tarik tersendiri bagi ribuan penonton yang memadati Alun-Alun Ponorogo. Suasana mistis dan heroik yang terpancar dari setiap gerakan penari Reog seolah membawa kita kembali ke masa lampau, merasakan semangat para leluhur.



Dimensi Spiritual: Sedekah Bumi dan Larungan Sesaji

Selain hiruk pikuk kesenian, Grebeg Suro juga sarat dengan makna spiritual. Salah satu ritual penting adalah Sedekah Bumi, di mana masyarakat Ponorogo bersama-sama mengarak gunung hasil bumi dan berbagai sajian menuju Alun-Alun. Gunungan ini melambangkan rasa syukur atas rezeki yang melimpah dari Tuhan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat, melambangkan kebersamaan dan gotong royong.

Puncak dari dimensi spiritual Grebeg Suro adalah prosesi Larungan Sesaji di Telaga Ngebel. Telaga yang indah ini menjadi saksi bisu ritual larung sesaji yang berisi kepala kerbau dan aneka sesaji lainnya. Prosesi ini diyakini sebagai wujud doa dan harapan agar Ponorogo senantiasa dilindungi dari mara bahaya dan diberikan kemakmuran sepanjang tahun. Aura mistis dan sakral sangat terasa dalam prosesi ini, mengingatkan kita akan hubungan erat manusia dengan alam dan kekuatan Ilahi.

Lebih dari Sekadar Perayaan: Penggerak Ekonomi dan Pariwisata

Grebeg Suro bukan hanya agenda budaya, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian dan pariwisata Ponorogo. Ribuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, berbondong-bondong datang untuk menyaksikan kemeriahan ini. Hal ini berdampak positif pada sektor UMKM, penginapan, kuliner, dan berbagai industri kreatif lokal. Masyarakat Ponorogo pun merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari penyelenggaraan Grebeg Suro.

Masa Depan Grebeg Suro: Melestarikan Warisan, Menarik Dunia

Grebeg Suro Ponorogo adalah permata budaya Indonesia yang patut dijaga kelestariannya. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan tradisi ini patut diacungi jempol. Dengan sentuhan inovasi dan promosi yang gencar, Grebeg Suro memiliki potensi besar untuk menjadi festival kelas dunia yang tak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan adiluhung bangsanya.



Referensi:
jatim.idntimes.com
ponorogonews.com



INDONESIAN TREASURY